

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU STATUS KEMISKINAN DAERAH DI INDONESIA

Anjas Risnu Utari

Mahasiswi Program MIESP Undip
Email : autarie91@yahoo.co.id

Anita Primadani

Mahasiswi Program MIESP Undip
Email : anita.primadani@yahoo.com

Lely Nurlaela

Mahasiswi Program MIESP Undip
Email : lelyapriani@yahoo.co.id

Abstrak

Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi isu yang sangat krusial. Walaupun angka kemiskinan menurun, tetapi faktanya masih banyak orang yang berada pada garis kemiskinan sehingga apabila ada guncangan ekonomi akan sangat rentang kembali lagi ke bawah garis kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi meliputi beberapa aspek antara lain pendidikan, kesehatan, demografi, dan juga struktural serta budaya. Penelitian ini akan membahas tentang beberapa faktor seperti angka lahir hidup (ALH), persentase penduduk yang tamat akademi/universitas (Ijazah), tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan kepadatan pendudukan yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Data yang digunakan diambil dari Sensus Penduduk tahun 2010. Dengan menggunakan analisis diskriminan, terbukti bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah PDRB per kapita dan kepadatan penduduk.

Kata kunci : Kemiskinan, Analisis Diskriminan

Abstract

In Indonesia, poverty is still a crucial issue. Although the poverty rate decreased but the fact is there are many people who are poor, because most people are still in a vulnerable of poor condition. The causes of poverty include various aspects such as education, health and demographics, both structural and cultural. This study will discuss about whether factors such as the number of Birth Life (ALH), percentage of residents who qualified, open unemployment rate, economic growth, GDP per capita and population density actually affect the percentage of poverty in Indonesia. The data used are the 2010 Population Census data. By using discriminant analysis, the result that the factors which is influence the percentage of poverty is GDP per capita and population density.

Key word : Poverty, Discriminant Analysis

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tahapan yang akan dilalui oleh setiap negara berkembang menuju kemantapan ekonomi. Pada awal pembangunan ekonomi, negara berkembang biasanya lebih menitikberatkan pada pertumbuhan yang tinggi dan mengesampingkan pemerataan (Todaro, 2006). Indonesia juga mengalami hal tersebut. Sebagian besar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih dominan hanya untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa diimbangi dengan adanya pemerataan.

Ketimpangan yang terjadi akibat ketidakmerataan pendapatan pada akhirnya akan menciptakan kemiskinan dalam masyarakat. Kemiskinan yang terjadi pada beberapa daerah berbeda satu dengan lainnya. Semuanya tergantung oleh seberapa besar masyarakat dengan mudah mengakses sumberdaya dan fasilitas publik yang ada. Semakin mudah sumberdaya yang tersedia diakses oleh masyarakat biasanya ketimpangan pendapatan akan semakin kecil dan kemiskinan dapat berkurang, begitu juga sebaliknya.

Di tengah situasi globalisasi ekonomi yang bertumpu pada kekuatan pasar dengan tingkat persaingan yang semakin keras di satu pihak dan dinamika perkembangan ekonomi yang demikian cepat di pihak yang lain, tampaknya akan menambah beban bagi mereka yang tergolong sebagai masyarakat miskin karena kalah bersaing dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada dengan golongan lain yang mempunyai kelebihan penguasaan dan akses terhadap sumberdaya.

Besarnya persentase penduduk miskin selain tergantung kepada pendapatan per kapita, juga tergantung pada corak distribusi pendapatannya, semakin tidak merata distribusi pendapatan masyarakat maka kemungkinan semakin besar persentase penduduk yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan.

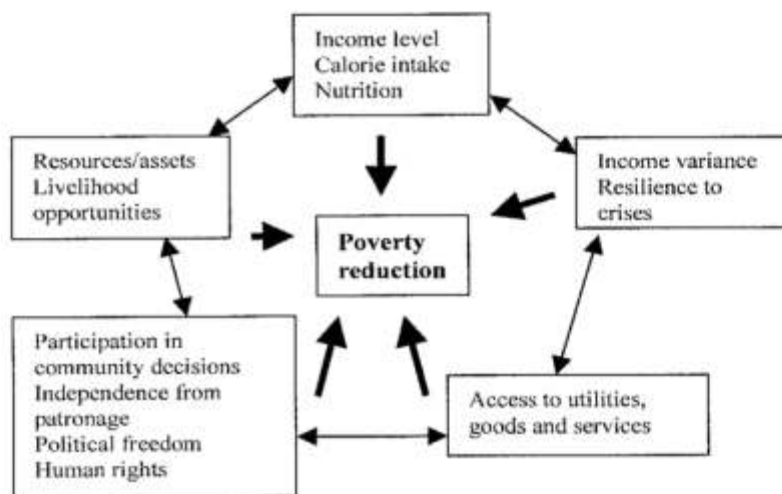
Pemerintah sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap kehidupan rakyatnya, selalu berusaha mengurangi angka kemiskinan dengan berbagai cara, salah satunya adalah penyediaan sarana dan prasarana publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyediaan sarana publik tersebut terus diupayakan dapat membantu kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Sarana dan prasarana publik yang disediakan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga berupa berbagai bantuan langsung diberbagai bidang krusial, seperti pendidikan dan kesehatan. Karena melalui bidang-bidang penting tersebut pemerintah dapat memantau tingkat kehidupan masyarakatnya.

Masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan, harus berada dalam kondisi baik agar pembangunan di suatu daerah dapat terlaksana dengan baik. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya secara fisik tetapi juga pembangunan manusianya. Sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat maka pembangunan baru dapat berhasil mencapai tujuan, dimana salah satu tujuan pembangunan adalah mencapai masyarakat sejahtera, adil dan makmur, yang artinya kemiskinan dapat dikurangi sekaligus dihilangkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Menurut Sulistiyani (2004) dalam Kalauw (2005), apabila dilihat dari penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang sudah terjadi secara turun temurun. Keadaan alam dan sumber daya yang sangat terbatas mengakibatkan produktivitas menjadi sangat rendah, sehingga mengakibatkan penduduk yang tinggal di daerah tersebut menjadi miskin, dan kemiskinan ini akan sulit untuk dirubah. Sedangkan kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang terjadi pada suatu kelompok penduduk disebabkan karena ketidakmerataan alokasi sumber daya yang terjadi.

Gambar 1
Dimensi Kemiskinan



Menurut Smith (2004), kemiskinan disebabkan oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap beberapa hal mendasar. Pada gambar 2.1 diatas, terlihat bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa keterbatasan, yaitu akses terhadap sumber daya, level pendapatan, variasi pendapatan, akses terhadap barang dan jasa serta keterbatasan dalam berorganisasi. Kelima hal tersebut saling mempengaruhi dan merupakan faktor dasar penyebab kemiskinan dalam suatu masyarakat

Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif merupakan konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang. Kedua jenis kemiskinan ini menunjuk pada perbedaan sosial yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan pendapatan.

Cakupan kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga para ekonom pembangunan menggunakan konsep kemiskinan absolut (*absolute poverty*) untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar akan makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Dalam kemiskinan absolut ini, masyarakatnya hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau dibawah garis kemiskinan internasional, dimana garis tersebut tidak mengenal tapal batas antarnegara dan tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita suatu negara.

Dalam Todaro dan Smith (2006), terdapat beberapa kriteria ukuran kemiskinan yang dapat diterima secara luas oleh para ekonom pembangunan, yaitu prinsip-prinsip anonimitas, independensi populasi, monotonisitas, dan sensitivitas distribusional. Dua prinsip pertama menerangkan bahwa ukuran cakupan kemiskinan tidak boleh tergantung pada siapa yang miskin atau pada apakah negara tersebut mempunyai jumlah penduduk yang banyak atau sedikit. Prinsip monotonisitas berarti bahwa jika memberi sejumlah uang kepada seseorang yang berada di bawah garis kemiskinan, dan jika semua pendapatan yang lain tetap, maka kemiskinan yang terjadi tidak mungkin lebih tinggi daripada sebelumnya. Prinsip sensitivitas distribusional menyatakan bahwa, dengan semua hal lainnya sama, jika mentransfer pendapatan dari orang miskin ke orang kaya maka akibatnya perekonomian akan menjadi lebih miskin.

Kemiskinan relatif pada dasarnya menunjuk pada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Mereka yang berada dilapis terbawah dalam persentil derajat kemiskinan suatu masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin. Dalam kategori ini, mereka yang digolongkan sebagai penduduk miskin sebenarnya sudah dapat mencukupi hak dasarnya, namun tingkat terpenuhannya berada dilapisan terbawah.

Kemiskinan relatif memahami kemiskinan dari dimensi ketimpangan antar kelompok penduduk. Pendekatan ketimpangan tidak berfokus pada pengukuran garis kemiskinan, tetapi pada besarnya perbedaan antara 20 atau 10 persen masyarakat paling bawah dengan 80 atau 90 persen masyarakat lainnya. Kajian yang berorientasi pada pendekatan ketimpangan tertuju pada upaya memperkecil perbedaan antara mereka yang berada dibawah (miskin) dan mereka yang berada diatas (makmur) dalam setiap dimensi stratifikasi dan diferensiasi sosial. Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan dan disesuaikan dengan tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

Badan Pusat Statistik mengukur kemiskin dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan yang dimaksud adalah pengeluaran konsumsi yang setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan non makan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian dan barang atau jasa lainnya. Komponen garis kemiskinan makanan adalah nilai rupiah yang dikeluarkan untuk memenuhi 52 komoditi makanan, sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah nilai rupiah dari 27 sub kelompok pengeluaran yang terdiri atas 51 jenis komoditi dasar non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan (BPS, 2013).

Bank Dunia menghitung tingkat dan jumlah penduduk miskin di dunia dengan menggunakan ukuran tunggal yang seragam untuk semua negara, yaitu dengan menentukan bahwa seseorang dianggap miskin apabila pendapatannya dibawah \$ US 2 per hari. Selain Bank Dunia, lembaga internasional lain yang melakukan pengukuran terhadap kemiskinan adalah UNDP, dengan menggunakan Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index*). Didalam HDI, kemiskinan diukur menggunakan gabungan dari tiga hal utama, yaitu daya hidup (probabilitas kelahiran samapai dengan umur 40 tahun), pendidikan dasar (persentase penduduk dewasa yang buta huruf), dan ketetapan ekonomi (persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan air bersih ditambah persentase anak-anak dibawah usia 5 tahun yang kekurangan berat badan. Semakin rendah nilai HPI yang terjadi menunjukkan kedaan masyarakat semakin baik, sedangkan nilai HPI yang tinggi menunjukkan kemiskinan yang semakin besar karena semakin besar masyarakat yang kehilangan tiga hal utama diatas.

Indikator Sosial Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang multidimensional yang melibatkan perubahan struktur, sikap hidup dan juga kelembagaan. Pembangunan ekonomi memiliki beberapa indikator. Indikator merupakan varabel-variabel yang membantu dalam mengukur perubahan

perubahan yang terjadi. Seperti kita ketahui pembangunan merupakan sebuah proses transisi dari sebuah tingkatan ekonomi ke tingkatan ekonomi yang lebih tinggi. Indikator – indikator pembangunan dapat dilihat dari sudut ekonomi dan non-ekonomi.

Indikator ekonomi yang digunakan dalam pembangunan salah satunya adalah GDP perkapita. GDP atau gross domestic product merupakan refleksi dari pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita suatu negara sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan juga pembangunan di suatu negara. Pendapatan perkapita dihitung dengan cara membagi pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara yang bersangkutan. Pendapatan nasional yang tinggi belum tentu menunjukkan pendapatan perkapita yang tinggi.

Selain indikator ekonomi ada pula indikator non ekonomi. Indikator non – ekonomi memang tidak bisa dihitung secara pasti seperti indikator ekonomi. Indikator pembangunan yang bersifat non-ekonomi salah satunya adalah indikator sosial. Indikator sosial ini dilihat dari HDI (*human development index*) dan PQLI (*physical quality life index*).

Metode Penelitian

1. Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah tersedia dan telah diproses oleh pihak-pihak lain sebagai hasil atas penelitian yang telah dilaksanakannya. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dan dapat didownload di www.bps.go.id

2. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia yaitu berjumlah 497 kabupaten/kota. Dengan menghilangkan missing data dan outlier yang berjumlah 244, maka observasi yang diambil dalam studi kasus ini berjumlah 253.

3. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu dengan mengumpulkan data-data sekunder yang sesuai dengan variabel-variabel penelitian yang telah ditentukan.

4. Teknik analisis

Data kuantitatif yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah teknik multivariat yang termasuk pada *Dependence Method*, dengan ciri adanya variabel dependen dan independen. Dengan demikian, terdapat variabel yang memiliki hasil tergantung pada data variabel independen. Ciri khusus dari analisis diskriminan adalah data variabel dependen harus berupa data kategori, sedangkan data untuk variabel independen justru berupa data rasio.

Analisis diskriminan memiliki beberapa asumsi penting yang harus dipenuhi agar model diskriminan dapat digunakan. Asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut :

- *Multivariate Normality*, yaitu variabel independen harus terdistribusi normal;
- Matriks kovarian dari semua variabel independen harus sama;
- Tidak terdapat korelasi antar variabel independen; dan
- Tidak terdapat data yang sangat ekstrem (*outlier*) pada variabel independen.

Fungsi diskriminan pertama adalah kombinasi linear yang memaksimumkan antar hubungan dan didefinisikan oleh persamaan berikut :

$$DF_1 = a_{10}x_0 + a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1p}x_p \dots\dots\dots(1)$$

Pada prosedur analitik, kemudian mulai untuk menemukan kombinasi linear kedua yang berfungsi sebagai pemisah terbaik berikutnya dari kelompok-kelompok. Hasil dari persamaan akan menjadi :

$$DF_2 = a_{20}x_0 + a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2p}x_p \dots\dots\dots(2)$$

Dalam analisis diskriminan, susunan fungsi diskriminan berkorelasi dengan dua fungsi sebelumnya (fungsi 1 dan 2) dan berfungsi sebagai pemisah terbaik ketiga kelompok. Dalam kondisi dengan 3 kelompok dan 10 variabel, maka analisis akan terdiri dari dua fungsi diskriminan, sedangkan jika hanya terdapat 2 variabel samak maka hanya terdapat satu fungsi diskriminan yang terbentuk. Setelah fungsi terbentuk, maka lokasi masing-masing kelompok pada fungsi diskriminan (Y_k) ditentukan dengan mengalikan vektor rata-rata untuk setiap subjek pada semua variabel indenpenden (X_1) vektor koefisien yang tidak terstandarkan (a') :

$$y_1 = a'x_1 \dots\dots\dots(4)$$

dan

$$y_2 = a'x_2 \dots\dots\dots(5)$$

Nilai tengah antara dua kelompok pada fungsi diskriminan adalah dijumlahkan sebagai berikut :

$$m = \frac{(\bar{y}_1 + \bar{y}_2)}{2} \dots\dots\dots(6)$$

Selanjutnya subjek-subjek diklasifikasikan berdasarkan pada nilai (*skore*) fungsi diskriminan individual mereka, z_i – terhadap salah satu di antara dua kelompok yang berdasarkan pada keikutsertaan (mengikuti) aturan pengambilan keputusan :

Jika $z_i \geq m$, diklasifikasikan pada subjek yang termasuk pada kelompok 1

Jika $z_i < m$, lalu diklasifikasikan pada subjek yang termasuk pada kelompok 2

Hasil Dan Pembahasan

Sebelum pengolahan data untuk mendapatkan fungsi diskriminan, perlu dilakukan beberapa uji terhadap data yang ada untuk melihat *outlier*, normalitas dan varians data. Uji-uji yang perlu dilakukan adalah uji outlier dan missing data, uji normalitas, dan uji homokedastisitas. Dari pengolahan uji homokedastisitas diperoleh hasil bahwa hanya terdapat enam variabel yang secara signifikan memiliki varians identik dari sepuluh variabel yang diujikan, enam variabel tersebut adalah variabel Angka Lahir Hidup (ALH), persentase penduduk yang tamat akademi/universitas (Ijazah), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pertumbuhan ekonomi (growth), PDRB per Kapita (Ln_PDRB), dan kepadatan pendudukan (Ln_Kpadtn).

Tahap selanjutnya adalah menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antar-grup untuk setiap variabel. Berikut adalah tabel hasil uji variabel pada analisis diskriminan.

Tabel 1
Tests of Equality of Group Means

	Wilks' Lambda	F	df1	df2	Sig.
ALH	.975	3.220	2	250	.042
IJAZAH	.987	1.671	2	250	.190
TPT	.977	2.926	2	250	.055
Growth	.997	.437	2	250	.647
LN_PDRB	.904	13.218	2	250	.000
LN_Kpdtm	.950	6.620	2	250	.002

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2012

Variabel **ALH (0,042)**, **Ln_PDRB (0,000)**, dan **Ln_Kpdtm (0.002)** memiliki angka Sig. dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan ada perbedaan antar-grup, atau suatu daerah dikatakan memiliki tingkat kemiskinan rendah, sedang dan tinggi bergantung pada ketiga variabel tersebut. Namun demikian, hal tersebut tidak menjamin apakah ketiga variabel tersebut akan dimasukkan pada fungsi diskriminan. Untuk itu, dilakukan analisis diskriminan dengan tetap menyertakan seluruh variabel yang ada.

Setelah melakukan uji variabel, maka dilakukan uji variabel yang membentuk fungsi diskriminan. Hasil uji variabel pembentuk fungsi diskriminan akan ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2
Variables Entered/Removed^{a,b,c,d}

Step	Entered	Min. D Squared					
		Statistic	Between Groups	Exact F			
				Statistic	df1	df2	Sig.
1	LN_PDRB	.109	1.00 and 2.00	4.513	1	250.000	.035
2	LN_Kpdtm	.378	.00 and 1.00	8.397	2	249.000	.000

At each step, the variable that maximizes the Mahalanobis distance between the two closest groups is entered.

- Maximum number of steps is 12.
- Minimum partial F to enter is 3.84.
- Maximum partial F to remove is 2.71.
- F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation.

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2012

Dari tabel diatas, hanya dua variabel yang akan digunakan untuk membentuk fungsi diskriminan, yakni variabel **Ln_PDRB** dan **Ln_Kpdtm**. Sedangkan variabel ALH ternyata tidak masuk dalam fungsi diskriminan. Langkah selanjutnya adalah proses pemasukan variabel dilihat dari angka Wilk's Lambda.

Tabel 3
Wilks' Lambda

Step	Number of Variables	Lambda	df1	df2	df3	Exact F			
						Statistic	df1	df2	Sig.
1	1	.904	1	2	250	13.218	2	250.000	.000
2	2	.855	2	2	250	10.159	4	498.000	.000

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2012

Pada step 1, jumlah variabel yang dimasukkan ada satu yaitu **Ln_PDRB**, dengan **Angka Wilk's Lambda** adalah **0,904**. Hal ini berarti **90,4 %** varians tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan antar grup-grup. Kemudian pada step 2, dengan tambahan variabel **Ln_Kpadtn** (lihat kolom Number of Variables sekarang adalah 2) **Angka Wilks's Lambda** turun menjadi **0,855**. Penurunan Angka Wilks's Lambda tentu baik bagi model diskriminan, karena varians yang tidak bisa dijelaskan juga semakin kecil (dari 90,4 % menjadi 85,5%). Pada Kolom F dan signifikansinya, terlihat baik pada pemasukan variabel 1 ataupun 2, semuanya adalah signifikan secara statistik. Hal ini berarti kedua variabel tersebut memang berbeda untuk ketiga tipe kemiskinan (rendah, sedang dan tinggi).

Kasus dalam penelitian ini memiliki tiga grup, sehingga akan terbentuk dua fungsi diskriminan dan tabel 4 berikut menunjukkan hasil pengujian perbedaan antar grup kemiskinan.

Tabel 4
Summary of Canonical Discriminant Function Eigenvalues

Function	Eigenvalue	% of Variance	Cumulative %	Canonical Correlation
1	.112 ^a	68.3	68.3	.317
2	.052 ^a	31.7	100.0	.222

a. First 2 canonical discriminant functions were used in the analysis.

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2012

Angka Canonical Correlation mengukur keeratan hubungan antara discriminant score dengan grup (karena ada tiga tipe daerah maka ada tiga grup). Angka **0,317** menunjukkan keeratan yang cukup tinggi, dengan ukuran skala asosiasi antara 0 dan 1, sedangkan untuk fungsi kedua (function 2) dengan grup juga tergolong besar tetapi lebih kecil dari yang pertama yaitu **0,222**.

Dalam uji beda rata-rata dari kedua fungsi diskriminan yang telah dilakukan diperoleh bahwa H_0 (tidak ada perbedaan rata-rata dari kedua fungsi diskriminan) ditolak, sehingga memang terdapat perbedaan nyata atau signifikan (Sig. 0,05) antara rata-rata dari kedua fungsi diskriminan yang terbentuk. Sedangkan untuk menjelaskan korelasi antara variabel independen dengan dua fungsi diskriminan yang terbentuk, maka tabel berikut akan menunjukkan Structure Matrix dari variabel-variabel yang digunakan.

Tabel 6
Structure Matrix

	Function	
	1	2
LN_PDRB	.946*	-.324
ALH ^a	-.302*	-.074
IJAZAH	.237*	.150
LN_Kpdtm ^a	.127	.992*
TPT ^a	.193	.225*
Growth ^a	.013	-.176*

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical discriminant functions

Variables ordered by absolute size of correlation within function.

*. Largest absolute correlation between each variable and any discriminant function.

This variable not used in the analysis.

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2012

Berdasarkan pada tabel 6, tanda a pada kanan atas nama variabel menunjukkan variabel tersebut tidak diikuti pada fungsi diskriminan. Dari kriteria terbut hanya variabel Ln_PDRB dan Ijazah yang lolos uji. Korelasi Ln_PDRB dengan fungsi 1 (0,946) lebih besar dari pada korelasinya dengan fungsi kedua (-0,324). Dengan demikian variabel Ln_PDRB masuk dalam fungsi diskriminan 1, begitu juga dengan Ijazah masuk ke dalam fungsi diskriminan 1.

Setelah diketahui variabel mana yang akan diikutsertakan dalam fungsi diskriminan yang akan dibuat, maka langkah selanjutnya adalah membuat fungsi diskriminan 1 dan 2. Tabel 7 berikut merupakan canonical discriminant function coefficients yang akan digunakan untuk membuat fungsi diskriminan.

Tabel 7
Canonical Discriminant Function Coefficients

	Function	
	1	2
LN_PDRB	1.985	-.253
LN_Kpdtm	.229	.669
(Constant)	-19.603	-1.105

Unstandardized coefficients

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2012

Fungsi Diskriminan 1 (lihat angka pada kolom FUNCTION 1) :

$$Z \text{ Score}_1 = -19,603 + (1,985 * \text{Ln_PDRB}) + (0,229 * \text{Ln_Kpadtn})$$

Fungsi Diskriminan 2 :

$$Z \text{ Score}_2 = -1,105 + (-0,253 * \text{Ln_PDRB}) - (0,669 * \text{Ln_Kpadtn})$$

Fungsi diskriminan yang telah terbentuk tersebut perlu dilakukan penilaian kelayakan fungsi diskriminan, sehingga dapat diketahui apakah fungsi diskriminan tersebut layak untuk dipakai atau tidak. Tabel 8 berikut akan menunjukkan hasil penilaian kelayakan tersebut.

Tabel 8
Classification Results^{b,c}

		Kategori _New	Predicted Group Membership			Total
			0	1	2	
Original	Count	0	38	18	17	73
		1	27	58	30	115
		2	13	20	32	65
	%	0	52.1	24.7	23.3	100.0
		1	23.5	50.4	26.1	100.0
		2	20.0	30.8	49.2	100.0
Cross- validated ^a	Count	0	38	18	17	73
		1	27	57	31	115
		2	13	21	31	65
	%	0	52.1	24.7	23.3	100.0
		1	23.5	49.6	27.0	100.0
		2	20.0	32.3	47.7	100.0

- a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the functions derived from all cases other than that case.
- b. 50.6% of original grouped cases correctly classified.
- c. 49.8% of cross-validated grouped cases correctly classified.

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2012

Berdasarkan pada fungsi diskriminan yang telah terbentuk dan telah diuji kelayakannya, maka dapat ditentukan komposisi anggota grup (daerah dengan kemiskinan tinggi, sedang dan rendah).

Tabel 9
Prior Probabilities for Groups

Kategori _New	Prior	Cases Used in Analysis	
		Unweighted	Weighted
0	.333	73	73.000
1	.333	115	115.000
2	.333	65	65.000
Total	1.000	253	253.000

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2012

Pada tabel **Prior Probabilities for Groups** di atas terlihat bahwa daerah yang menjadi anggota grup sedang adalah yang terbanyak yaitu **115 daerah** dari total 253 daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat 115 daerah dari 253 daerah dengan persentase penduduk miskin >10-20% di Indonesia.

Kesimpulan

Dari berbagai output dan analisis di atas, kesimpulan yang didapat dengan mengacu pada tiga pertanyaan pada awal penelitian adalah sebagai berikut :

1. Status daerah berdasarkan persentase kemiskinan dapat diprediksi secara tepat oleh variabel PDRB per kapita (Ln_PDRB) dan Kepadatan Penduduk (Ln_Kpadtn).
2. Dari kesimpulan pertama, maka didapatkan dua fungsi diskriminan yang terbentuk untuk membedakan status daerah berdasarkan persentase kemiskinan, yaitu :

$$Z\ Score_1 = -19,603 + (1,985 * Ln_PDRB) + (0,229 * Ln_Kpadtn)$$

Fungsi Diskriminan 2 :

$$Z\ Score_2 = -1,105 + (-0,253 * Ln_PDRB) - (0,669 * Ln_Kpadtn)$$

3. Karena hasil validasi mencapai angka 50.8%, maka fungsi diskriminan yang terbentuk dianggap tepat untuk menggolongkan suatu daerah berdasarkan persentasenya, kedalam kelompok rendah (daerah dengan persentase penduduk miskin kurang dari 10%), sedang (daerah dengan persentase penduduk miskin >10-20%) dan tinggi (daerah dengan persentase penduduk miskin >20%).

Saran

Kemiskinan yang terjadi pada daerah-daerah di Indonesia merupakan dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, sehingga saran dari penelitian ini adalah pemerintah sebagai penyedia fasilitas dasar, lebih meningkatkan penyediaan fasilitas-fasilitas umum guna menunjang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan pemerintah mengenai pengendalian jumlah penduduk juga perlu diperhatikan karena jumlah penduduk memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kemiskinan.

Daftar Pustaka

Craig A. Mertler dan Rachel A. Vannatta. 2005. *Advanced and Multivariate Statistical Methods, Practical Application and Interpretation*. United State of America: Pyczak Publishing.

Ghozali, Imam. (2009). *Analisis Multivariat IBM*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.

Joseph F. Hair, Dkk. (2010). *Multivariate Data Analysis, Seven ed.*, New Jersey: Pearson Education, Inc.

Santoso, Singgih. (2010). *Statistik Multivariat: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Smith, Laurence E. D. 2004. *Assessment of the Contribution of Irrigation to Poverty Reduction and Sustainable Livelihoods*. Water Resources Development Vol. 20. Carfax Publishing.

Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*. Erlangga : Jakarta.

Kalauw, Mochtar A. 2005. *Perkembangan Pendapatan Petani padi dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow*. Universitas Gadjah Mada. Tesis

Arief, S. 1990. *Dari Prestasi Pembangunan sampai Ekonomi Politik*. Kumpulan Karangan. UI Press. Jakarta.

Kuncoro, Mudrajat. 1997. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.